

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2012-2014

*ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE GOVERNMENT IN
NORTH MINAHASA REGENCY YEARS 2012-2014*

Oleh:

**Wahidah Niken Kusumadewi¹
Ventje Ilat²**

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email : ¹wahidahnikenkusumadewi@yahoo.co.id
²ventje.ilat@yahoo.com

Abstrak : Pelaksanaan otonomi di daerah, menyebabkan Kabupaten memikul tugas untuk memberikan suatu inovasi di dalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri didalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan. Tujuan penelitian untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam pengelolaan APBD tahun anggaran 2012 sampai 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pemerintah dalam mengelola pendapatannya dikatakan baik ini dibuktikan dari varians pendapatan yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatannya melebihi dari yang telah dianggarkan. Kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran belanja dikatakan baik ini dilihat dari tidak adanya realisasi belanja yang melebihi dari yang dianggarkan. Pemerintah harus berusaha untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dengan cara menggali potensi baru, dan perlu mengoptimalkan kinerja belanjanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan fisik daerah, pembangunan jalan, irigarsi, jaringan serta fasilitas umum masyarakat yang akan memberikan manfaat jangka panjang.

Kata kunci : kinerja keuangan, anggaran pendapatan, belanja

Abstract : *Autonomy in the area, causing the regency to take charge to provide an innovation within the government system to a better direction to become more independent in managing and improving financial performance. The research objective to analyze the financial performance of the government of North Minahasa Regency in the management of the budget of the fiscal year 2012 to 2014. The research method used is descriptive. The results showed the government's performance in managing both said earnings is evident from the revenue variance showed that the local government is able to realize revenue in excess of budgeted. The government's performance in managing the budget is said to be well seen from the absence of expenditures exceeding budgeted amounts. The government should strive to improve the government's performance in managing regional revenue by digging new potential, and the need to optimize the performance of their spending to boost economic growth and physical growth areas, road construction, irigarsi, networking and community facilities that will provide long-term benefits.*

Keywords : financial performance, budget revenues, expenditures

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasca reformasi tahun 1998, Republik Indonesia menerapkan desentralisasi sebagai daerah otonomi yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Selain itu juga dikeluarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai revisi dari UU No. 25 Tahun 1999. Undang-undang ini memberikan kewenangan bagi daerah untuk menngali dan memaksimalkan potensi lokal yang ada serta meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azaz umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azaz keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat.

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan atau penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan dalam peraturan bupati APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan adanya otonomi daerah, Kabupaten memikul tugas untuk memberikan suatu inovasi di dalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri di dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan pemerintahannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat bahkan kepada masyarakat. Pemerintah kabupaten Minahasa Utara dituntut untuk dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam pengelolaan APBD tahun anggaran 2012-2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik secara konvensional selalu diidentikkan sebagai badan-badan atau organisasi-organisasi pemerintah, akibat besarnya peran pemerintah dalam pendanaan, penentuan struktur organisasi maupun produk akhir sebuah institusi ekonomi, politik, maupun sosial sektor publik (Dahlia, 2014).

Akuntansi Keuangan Daerah

Mahmudi (2011:177), mendefinisikan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Ketentuan umum peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa, Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri yang meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Dalam pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip anggaran pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa, APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut: (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dan (f) Taat Asas.

Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2009:61), menyatakan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Mardiasmo (2009:70), menyatakan APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah meduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Tambunan (2014), menyatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah juga merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi
2. Fungsi Perencanaan
3. Fungsi Pengawasan
4. Fungsi Alokasi
5. Fungsi Distribusi
6. Fungsi Stabilisasi

Kinerja Keuangan Berdasarkan APBD

Ema (2014), menyatakan pengukuran kinerja keuangan memiliki banyak tujuan, paling tidak untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah akan bermanfaat dalam hal untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ulum (2009:1), menyatakan pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi beberapa maksud, yaitu :

1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja ini dimaksud untuk membantu pemerintah untuk fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Sehingga akan meningkatkan efisiensi dan evektivitas sektor publik dalam memberikan pelayanan publik.
2. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Analisis Kinerja Pendapatan

Analisis terhadap kinerja pendapatan dapat dilihat secara umum dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran maka kinerjanya dapat dinilai dengan baik. Mahmudi (2010:135), menyatakan bahwa analisis terhadap kinerja pendapatan antara lain dapat dilakukan dengan cara :

1. Analisis Varians Anggaran Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi anggaran sangat membantu dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran).

2. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkatkan. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah.

3. Analisis Rasio Keuangan

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan pemerintah propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

Analisis Kinerja Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Dalam hal belanja daerah juga dianalisis keserasian belanja untuk menilai keserasian antara belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Mahmudi (2010:155), menyatakan bahwa, analisis anggaran belanja dilakukan dengan cara :

1. Analisis Varians Anggaran Belanja

Analisis varians merupakan analisis perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki kinerja keuangan belanja yang tidak baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka kinerja keuangan belanja dinilai baik.

2. Rasio Efisiensi Belanja

Analisis efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Analisis efisien belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana pada belanja secara optimal. Analisis keserasian belanja meliputi:

a. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio ini memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya dapat habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran.

b. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan.

Penelitian Terdahulu

Sagay (2013) dengan judul *Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2009-2011*. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis kinerja pemerintah kabupaten Minahasa Selatan terhadap APBD tahun 2007-2011. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengolah pendapatannya belum baik. Kinerja pemerintah dalam mengolah anggaran belanja sudah cukup baik, ini dilihat dari tidak ada realisasi belanja yang melebihi anggaran. Melisa (2012) dengan judul *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dari tahun 2006-2010 melalui pendekatan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah dapat dikategorikan sangat efektif, ini dikarenakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara setiap tahun mampu merealisasikan penerimaan Pendapatan asli daerah dari yang direncanakan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif. Pasolong (2012:70) data kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data yang dapat dihitung untuk penafsiran yang kuat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti, yang berupa wawancara secara langsung mengenai objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan dari berbagai sumber, yang berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Minahasa Utara khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak instansi yang terkait.

2. Metode Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tentang objek yang diteliti berupa Laporan Realisasi APBD.
3. Media Elektronik dan Media Buku
Metode pengumpulan data yang dilakukan lewat media elektronik berupa jaringan internet serta pengumpulan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan topik.

Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sugiyono (2012:86) Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Data dan informasi yang dikumpulkan berupa laporan keuangan pemerintah, diidentifikasi kemudian dimasukkan kedalam perhitungan kinerja pendapatan dan kinerja belanja selama tiga tahun anggaran. Kemudian dilakukan perbandingan kinerja antar beberapa tahun, selanjutnya ditarik kesimpulan atas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara selama tiga tahun anggaran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang dikumpulkan berupa arsip dokumen pada bagian keuangan yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Dari hasil LRA APBD tersebut nantinya akan diketahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam pengelolaan APBD tahun 2012-2014.

Pembahasan

Analisis Kinerja Pendapatan

1. Analisis Varians Anggaran Pendapatan

Tabel 1. Analisis Varians Anggaran Pendapatan

Tahun	Realisasi	Anggaran	Selisih	Tingkat Ketercapaian (%)
2012	542.682.298.121	529.403.435.771	13.278.862.350	102,50
2013	589.388.340.723	584.385.630.821	5.002.709.902	100,85
2014	664.013.622.605	646.889.321.701	17.124.300.904	102,64
Rata-rata				101,98

Sumber : Data Olahan 2016

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari ketiga periode yang diteliti semua mengalami selisih yang diharapkan. Secara umum dilihat dari analisis varians pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Utara dapat dikatakan baik dimana rata-rata presentase 101,98%. Presentase tertinggi yaitu pada tahun 2014 sebesar 102,64%, sedangkan presentase terendah pada tahun 2013 yaitu 100,85%. Melihat hal ini pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara mampu merealisasikan pendapatannya melebihi dari yang telah dianggarkan.

2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t-1)}{\text{Pendapatan Th } (t-1)} \times 100\%$$

Tabel 2. Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	PAD	Pertumbuhan %	Total Pendapatan	Pertumbuhan %
2011	15.720.419.227	-	490.709.689.721	-
2012	25.280.972.741	60,81	542.682.298.121	10,59
2013	36.090.808.546	42,75	589.388.340.723	8,60
2014	49.283.471.770	36,55	664.013.622.605	12,66
Rata-rata		46,70		10,61

Sumber : Olahan Tahun 2016

Tabel 2 menunjukkan bahwa kinerja keuangan pendapatan daerah dilihat dari pertumbuhan PAD dikatakan mengalami pertumbuhan positif dimana rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 46,70%. Namun dalam tiga tahun anggaran mengalami penurunan tiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 60,81% sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 36,55%. Untuk pertumbuhan total pendapatan dikatakan pertumbuhan positif dimana rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 10,61%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 12,66% sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 8,60%.

3. Analisis Rasio Keuangan:

a. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Derajat Desentralisasi

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	(%)
2012	25.280.972.741	542.682.298.121	4,65
2013	36.090.808.546	589.388.340.723	6,12
2014	49.283.471.770	664.013.622.605	7,42
Rata-rata			6,06

Sumber : Data Olahan 2016

Tabel 3 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kabupaten Minahasa Utara tahun 2012-2014 dapat dikatakan sangat kurang. Dimana rata-rata tingkat derajat desentralisasi pada tahun 2012-2014 yaitu 6,06%. Dalam tiga tahun anggaran mengalami peningkatan tetapi tingkatannya masih sangat kecil. Ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah masih sangat kecil. Hal ini dapat dilihat bahwa kinerja pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja dalam mengelola PAD dengan cara menggali potensi baru atau dengan mengembangkan potensi yang sudah ada.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD	Transfer Pemerintah Pusat//Provinsi dan Pinjaman	Rasio Kemandirian (%)
2012	25.280.972.741	467.209.241.380	5,41
2013	36.090.808.546	501.662.905.177	7,19
2014	49.283.471.770	556.551.413.835	8,85
Rata-rata			7,15

Sumber : Data Olahan 2016

Tabel 4 menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah kabupaten Minahasa Utara tahun 2012-2014 masih sangat kurang. Dimana rata-rata rasio kemandirian dari tahun 2012-2014 yaitu 7,15 %. Dapat dilihat bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa Utara masih memiliki ketergantungan atas sumber dana yang berasal dari pihak ekstern. Pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja dalam mengelola PAD dan meminta kewenangan pada pemerintah pusat ataupun provinsi untuk dapat mengelola sumber pendapatan lain.

Analisis Kinerja Belanja

1. Analisis Varians Belanja

Tabel 5. Varians Anggaran Belanja

Tahun	Realisasi	Anggaran	Varians	(%)
2012	528.811.677.569	586.148.542.736	-60.336.865.167	90,22
2013	591.135.454.245	654.871.048.498	-63.735.594.253	90,26
2014	654.834.370.376	714.823.062.126	-59.988.691.750	91,60
Rata-rata				90,69

Sumber : Data Olahan 2016

Tabel 5 menunjukkan bahwa realisasi belanja tidak melebihi dari anggaran belanja. Secara umum dapat dilihat dari analisis varians belanja daerah bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2012-2014 dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata presentase mencapai 90,69%. Dalam tiga tahun anggaran tiap tahunnya mengalami peningkatan.

2. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 6. Rasio Efisien Belanja

Tahun	Realisasi	Anggaran	Rasio efisiensi belanja (%)
2012	528.811.677.569	586.148.542.736	90,22
2013	591.135.454.245	654.871.048.498	90,26
2014	654.834.370.376	714.823.062.126	91,60
Rata-rata			90,69

Sumber : Data Olahan 2016

Table 6 menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Pada tahun 2012-2014 semua angka pada rasio efisiensi menunjukkan angka dibawah 100% sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada pemborosan dalam penganggaran belanja untuk tiga tahun tersebut.

3. Analisis Keserasian Belanja

a. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 7. Rasio Belanja Modal

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Belanja Modal (%)
2012	114.654.479.715	528.811.677.569	21,68
2013	139.039.608.186	591.135.454.245	23,52
2014	148.072.839.603	654.834.370.376	22,61
Rata-rata			22,60

Sumber : Data Olahan 2016

b. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 8. Rasio Belanja Operasi

Tahun	Belanja Operasi	Total Belanja	Rasio Belanja Operasi (%)
2012	411.239.564.654	528.811.677.569	77,76
2013	451.986.878.059	591.135.454.245	76,46
2014	506.488.030.773	654.834.370.376	77,34
Rata-rata			77,18

Sumber : Data Olahan 2016

Dari perhitungan rasio belanja modal dan belanja operasi belanja selama tahun 2012-2014 sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil. Selama tahun 2012-2014 rata-rata belanja operasi sebesar 77,18%, sedangkan untuk belanja modal sebesar 22,60%. Hal ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBD lebih besar dialokasikan untuk belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Menurut Mahmudi (2010) pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki pendapatan tinggi.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan kinerja pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dapat dinilai berada pada tingkat kemampuan yang kurang. Hal ini dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan masih relatif kecil. Pemerintah daerah belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri dengan kata lain, masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.
2. Berdasarkan kinerja belanja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dapat dinilai belum optimal dalam keserasian belanja. Ini menunjukan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan porsi belanjanya untuk belanja operasi dari pada belanja modal.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah :

1. Pemerintah kabupaten Minahasa Utara harus lebih berusaha untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara menggalang potensi baru atau dengan mengembangkan potensi yang sudah ada.
2. Pemerintah kabupaten Minahasa Utara perlu mengoptimalkan kinerja belanjanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan fisik daerah, pembangunan jalan, irigasi, jaringan serta fasilitas umum masyarakat yang akan memberikan manfaat jangka panjang.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat meningkatkan penelitian yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlia, Dico. 2014. Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol. 2 No. 2, ISSN 2303-1174
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4516/4045> Di akses tanggal 23 Februari 2016. Hal.1130-1140.
- Ema, Nirwana. 2014. Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal SOROT* ISSN1907-364X, Vol.9 No.1.
<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JS/article/download/2329/2290> Di akses tanggal 4 Januari 2016. Hal 1-121.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi ketiga. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Pertama. UUI Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI, Yogyakarta.
- Melisa, Manappo. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Skripsi (tidak dipublikasikan)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Pasolong, Harbani 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005, tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Kementrian Dalam Negeri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 tahun 2006 tentang *Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2007*. Jakarta.

- Sagay, Brian. 2013. Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan. Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174, Vol.1 No. 3. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2362/1896> Di akses tanggal 14 Desember 2015. Hal 1165-1174.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.
- Tambunan, Ervan. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174, Vol.2 No.4. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6220/5746> Di akses tanggal 2 Januari 2016. Hal.81-89.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang *Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia . 2004. Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Bina Aksara, Jakarta.

